



LAPORAN

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi atau unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :

1. Seksi Tata Lingkungan;
2. Seksi Pengkajian Lingkungan; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.

D. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, membawahi :

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

- E. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
 - 3. Seksi Perubahan Iklim;
- F. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan; dan
 - 3. Seksi Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- G. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengadaan Tanah;
 - 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan; dan
 - 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- H. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- I. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 - 2029 adalah sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA".**

2. Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu : **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah dan Kehutanan"**.

3. Belanja, Program APBD

Total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 47.864.090.967,00 yang terdiri atas :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Total Pagu OPD | : Rp. 20.364.090.967,00 |
| 2. Total Pagu BLUD | : Rp. 27.500.000.000,00 |

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 terdiri dari sebagai berikut :

Pagu APBD Rp. 20.364.090.967,00

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ➤ Belanja Operasi | : Rp. 20.364.090.967,- |
| ➤ Belanja modal | : Rp. 0,- |
| ➤ Belanja tidak terduga | : - |
| ➤ Belanja transfer | : - |

Pagu BLUD Rp. 27.500.000.000,00

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ➤ Belanja Operasi | : Rp. 21.500.000.000,- |
| ➤ Belanja modal | : Rp. 6.000.000.000,- |
| ➤ Belanja tidak terduga | : - |
| ➤ Belanja transfer | : - |

b. Program dan Anggaran APBD

Terdapat 17 (tujuh belas) program kegiatan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan program dan rincian anggaran antara lain sebagai berikut :

Program kegiatan APBD

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	92.719.597
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.079.435
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	88.381.493
4.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	113.216.966
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	143.640.445
6.	Program Penatagunaan Tanah	80.767.445
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.203.942.125,70
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0
9.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1.919.325.756
10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	95.553.955,30
11.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah B3	101.092.000
12.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung Hidup (PPLH)	319.230.109
13.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12.000.000
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan	565.721.561

	dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
15.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	625.431.592
16.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	220.915.487
17.	Program Pengelolaan Persampahan	232.073.000
	Total	47.864.090.967

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada RENSTRA

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,55	71,93	68,19	68,44	68,44	
2.	Bidang Urusan Pertanahan						
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan	90	95	95	95	95	

	peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	90	95	95	95	95
	Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,00	13,50	14,00	14,50	14,50
3.	Bidang Urusan Lingkungan Hidup					
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	15	16	17	18	18
	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,25	60,11	75,48	75,68	75,68
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,75	87,80	61,80	62,20	62,20
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,71	43,55	68,42	68,49	68,49
	Indeks Kualitas Air Laut	69,40	82,00	70,48	70,53	70,53

	(IKAL)					
	Persentase Penurunan Emisi GRK	7,14	8,04	18,5	19,67	19,67
	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	86,573	87,441	88,268	89,057	89,057
	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	36,00	37,00	38,00	39,00	39,00

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tersebar di beberapa lokasi dan setiap kegiatan dapat mencakup hampir seluruh 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

a) Kota Palembang

kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
- Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
- Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup

b) Kota Lubuk Linggau

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

c) Kota Pagaralam

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)

- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

d) Kota Prabumulih

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

e) Kabupaten Ogan Ilir

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

f) Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai

- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

g) Kabupaten Ogan Komering Ulu

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

h) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

i) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara

- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

j) Kabupaten Muara Enim

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

k) Kabupaten Lahat

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

l) Kabupaten Empat Lawang

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Air Laut

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

m) Kabupaten Musi Rawas

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

n) Kabupaten Musi Banyuasin

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

o) Kabupaten Banyuasin

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

p) Kabupaten PALI

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

q) Kabupaten Muratara

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembuatan Dokumen Rencana Adaptasi dan /atau Mitigasi Perubahan Iklim
- Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)
- Pemantauan Kualitas Air Sungai
- Pemantauan Kualitas Udara
- Pemantauan Kualitas Air Laut
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan sebagai bahan masukan SKPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

1. Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memastikan target rencana program dan kegiatan pembangunan dapat dicapai melalui penilaian hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah agar realisasi kegiatan yang telah ditetapkan tercapai sesuai Renstra.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TA 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II TA 2025 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah :

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi sTriwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	47.864.090.967,00	17.525.432.076	40	36,61	45	44,42
Belanja Operasi	41.864.090.967,00	16.180.166.676	40	38,64	45	44,50
Belanja Modal	6.000.000.000,00	1.345.265.400	40	22,42	45	30
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja DLHP Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Triwulan II TA 2025 sebesar **Rp. 17.525.432.076,00,-** atau **36,61%** dan realisasi fisik **44,42%**.

No	Interval Nilai Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi	Keterangan
1	90 % ≤ 100 %	Tinggi	Hijau	
2	66 % ≤ 90 %	Sedang	Kuning	
3	0 % ≤ 65 %	Rendah	Merah	

- b. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tercantum pada :
- ✓ Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	67,35	67,59	67,40	68,53	70,79	69,70	71,18	72,12	71,55	70,20
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	0	7,5	0	10	12	23,33	13	27	15	44
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	62,74	64,45	62,82	64,62	67,05	58,25	67,15	59,85	67,25	58,16
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	96,19	96,30	96,23	96,86	84,55	86,28	84,65	89,10	84,75	87,76
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	49,189	49,190	49,206	50,210	38,02	41,25	39,86	42,17	41,71	44,38

No.	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	0	0	0	0	68,24	75,53	68,82	81,03	69,40	70,37
		Persentase Penurunan Emisi GRK	%	4,95	4,39	5,56	5,56	6,18	11,61	6,80	17,60	7,14	20,20
		Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	Ton CO2 eq/Tahun	82.675	2.943	83.718	9.198	84.714	16.423,50	85.665	11.033	86.573	282.128
		Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	34	34	34,5	34,5	35	35,6	35,6	40	36	40
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	-	-	100	50	85	90	-

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
				2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	0	75	0	75	80	100	90	95	90	95,04
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam satu daerah provinsi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	%	11	23,68	11,66	12,2	12,00	17,53	12,45	19,1	13	13
		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang termediasi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-

✓ Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2024	2025	2025	2026	2026
1	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,93	72,69	68,19	-	68,44	-
			Indeks Kualitas Air (IKA)	60,11	59,54	75,48	-	75,68	-
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,80	90,25	61,80	-	62,2	-
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	43,55	44,52	68,42	-	68,49	-
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	82,00	79,71	70,48	-	70,53	-
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	16	16	17	1	18	-

			PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah						
			Persentase Penurunan Emisi GRK	8,04	20,20	18,5	-	19,67	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	87.441	44.577,583	88.268	-	89.057	-
			Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37	37	38	6	39	-
		Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	45	-	45	-	45	-

		dan Ketertiban Umum	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	15	14	15	20	15	-
			Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,5	14	14	50	14,5	-

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET TAHUNAN						
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	↶	↷
Bidang Urusan Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	95	95	95	96	96	96
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	95	95	95	96	96	96
3	Persentase Konflik Lahan yang Terfasilitasi	%	14	100	100	100	100	100
Bidang Urusan Lingkungan Hidup								
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Perusahaan	17	18	18	18	19	19

5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
---	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

6	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	75,48	75,68	75,88	76,08	76,28	76,48
7	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8
↶	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	68,42	68,49	68,56	68,63	68,7	68,76
↷	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	70,48	70,53	70,58	70,63	70,68	70,75
10	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	18,5	19,67	20,85	22,02	23,2	24,37
11	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	ton CO2 eq	88,268	89,057	-	-	-	-
12	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	38	39	40	40	40	40
13	IKPS (Pengelolaan Sampah Timbunan)	Point	45	52	52,5	53	53,5	54
14	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	43	47	48	49	49	50

c. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

- i. (SIPP-LINK SUMSEL) dan Ancer On The Spot (Anti Cemar On The Spot) Piagam penghargaan dari kepala lembaga administrasi negara Nomor 936/K.1/PDP.09 Tanggal 16 November 2019.
- ii. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 atas Program Kampung Iklim 2022 Kategori Pembina Proklam Tingkat Provinsi
- iii. Perhargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (**BAPETEN**) Kepada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir dengan kegiatan Pengukuran dan Analisa Tahun 2022
- iv. Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut (Si-Gambut) Nominasi Penghargaan Bhumandala – Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Tahun 2023.
- v. Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Oktober 2023
- vi. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 23 Oktober 2023
- vii. Penghargaan Kategori Terinovasi atas Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dari Gubernur Sumatera Selatan pada Bulan November 2023.
- viii. Penghargaan Pembinaan Proklam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Agustus 2024.
- ix. Penghargaan Adi Niti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Laboratorium Pemerintah dengan Ruang Lingkupnya Lengkap dan Taat dalam Perpanjangan Registrasi tanggal 10 September 2024.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi adalah :

1. APBD :

Terdapat Indikator Kinerja yang tidak dapat terlaksana yakni pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan KKPR harus dilaksanakan melalui sistem OSS, akan tetapi terdapat keterbatasan pada sistem OSS dalam penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

b. Tindak lanjut :

1. APBD

Agar dilakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi (DPUBMTR, DPMPSTSP Prov. Sumsel) dan pemerintah pusat terkait keterbatasan sistem OSS untuk penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sumber APBD pada Triwulan II TA 2025, untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN



Herdi Apriansyah, S.STP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001

